

ELEKTABILITAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUBU RAYA

Ori Fahriansyah dan Syarif Usmulyadi

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: orifahryuntan@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab rendahnya elektabilitas Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019. Sebagaimana di ketahui delapan dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kubu Raya elektabilitas Pemilihan Legislatif lebih rendah dari Pemilihan Presiden, terutama di Kecamatan Sungai Ambawang sebagai yang tertinggi. Untuk menemukan jawaban, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan para informan dan mengumpulkan dokumen dan berita dari berbagai sumber media. Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan basis teori perilaku memilih (*voting behavior*). Tulisan ini berkaitan dengan tiga faktor penting, yaitu minimnya informasi para calon yang terserap oleh pemilih, rendahnya kinerja anggota DPRD dan adanya praktek pembelian suara (*vote buying*) dengan harga yang tinggi di pemilihan presiden.

Kata Kunci: elektabilitas, *distrust*, *framing*, pemilu legislatif, *vote buying*.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pengecualian untuk Pemilu di luar negeri yang diatur pelaksanaannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bertahap terhitung tanggal 8 - 14 April 2019. Tujuan dilaksanakan Pemilu serentak adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu yang ditetapkan. Tentu saja harapannya wakil-wakil terpilih memiliki kualitas mumpuni baik dari sisi moral, integritas, akuntabilitas, dan intelegensi dalam menjalankan tugas negara, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemilu serentak 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di samping itu, sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya ada berbagai peraturan dari KPU. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya untuk menjamin pelaksanaan Pemilu berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia- Jujur dan Adil (LUBER-Jurdil) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945).

Sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia, Pemilu serentak tahun 2019 bagi masyarakat pemilih di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, merupakan pengalaman pertama. Bukan karena mereka tidak pernah memilih sebelumnya, tetapi dalam Pemilu serentak ini mereka menyalurkan haknya pada dua Pemilu sekaligus, yaitu Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg). Dalam Pileg mereka dihadapkan dengan banyaknya kartu suara yang harus mereka coblos pada saat hari pemungutan suara dilangsungkan. Terdapat 4 (empat) surat suara Pileg meliputi surat suara untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan DPRD Kabupaten Kubu Raya. Ditambah dengan surat suara Pilpres keseluruhan surat suara yang seharusnya mereka coblos 5 (lima) surat suara. Di samping itu, jumlah calon yang terdaftar di surat suara Pileg jumlahnya sangat banyak. Untuk calon DPRD Kubu Raya saja jumlahnya saja mencapai 509 calon. Belum lagi calon DPRD Provinsi yang jumlahnya 857 calon, DPR RI 172 calon dan DPD RI 40 calon. Para calon yang banyak ini merupakan representasi dari 16 partai politik peserta Pemilu terkecuali untuk calon DPD yang merupakan calon perseorangan.

Kecamatan Sungai Ambawang merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya Kalbar. Berdasarkan Kecamatan Sungai Ambawang Dalam Angka Tahun 2018, jumlah penduduk Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2017 sebanyak 76.489 jiwa yang terdiri dari 39.167 laki-laki dan 37.322 perempuan (BPS Kubu Raya, 2018). Dari jumlah penduduk tersebut, menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat sebanyak 58.563 penduduk yang memiliki hak pilih atau tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 dengan pembagian sebanyak 29.996 laki-laki dan 28.567 perempuan (<https://kpu.kuburayakab.go.id>, 2018). Tersebar di 15 kecamatan meliputi Durian, Simpang Kanan, Pugug, Bengkarek, Pasak Piang, Pasak, Panca Roba, Lingga, Korek, Jawa Tengah, Sungai Ambawang Kuala, Mega Timur, Teluk Bakung, Ampera Raya, dan Sungai Malaya. Dibandingkan dengan jumlah pemilih di kecamatan lainnya di Kabupaten Kubu Raya, jumlah pemilih di Kecamatan Sungai Ambawang merupakan yang terbesar ketiga setelah Sungai Raya dan Sungai Kakap. Kecamatan Sungai Raya memiliki jumlah pemilih sebesar 159.198 pemilih, sedangkan Sungai Kakap sebesar 83.092 pemilih (<https://kpu.kuburayakab.go.id>, 2018).

Dalam Pemilu 17 April 2019, pemilih yang datang ke TPS untuk memilih diberi 5 (lima) lembar surat suara oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang mana Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara terpisah yang didahului oleh Pileg dan 30 hari kemudian baru dilaksanakan Pilpres. Dengan 5 (lima) lembar surat suara dengan ukuran yang cukup besar ditambah dengan banyaknya calon untuk Pileg memang dikhawatirkan membingungkan para pemilih. Apalagi untuk surat suara DPRD tidak mencantumkan gambar atau foto calon, namun hanya menampilkan nama calon saja.

Fenomena lainnya terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak adalah terlalu masifnya pemberitaan tentang Pilpres ketimbang Pileg. Selaku penyelenggara Pemilu KPU sendiri mengaku bahwa perhatian mereka lebih tersedot ke Pilpres ketimbang Pileg sebagai akibat adanya *framing* media. Ketidakseimbangan pemberitaan yang diliput berbagai media mengkhawatirkan banyak pihak akan terjadinya mis-orientasi pemilih, di mana pemilih mungkin lebih banyak mencoblos surat suara Pilpres ketimbang surat suara Pileg.

Perbandingan perolehan suara Pilpres dan Pileg dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Kubu Raya memang menunjukkan bahwa Pileg lebih

banyak dicoblos daripada Pilpres. Masing-masing 339.762 untuk Pilpres dan 378.096 untuk Pileg. Dengan demikian, terdapat selisih suara sebesar 89.732 suara. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh dalam tabel 1.1. berikut terlihat 8 (delapan) dari 9 (sembilan) kecamatan elektabilitas Pileg lebih rendah daripada Pilpres. Hal ini tentu menimbulkan rasa ingin tahu lebih besar dan menimbulkan penafsiran bahwa secara kualitas terjadi penurunan daya pilih terhadap Pileg pada Pemilu Serentak tahun 2019.

Tabel: Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota DPRD Kubu Raya Tahun 2019

No	Kecamatan	Suara Sah Pemilihan Presiden	Suara Sah Pemilihan Anggota DPRD	Perban- dingan Selisih Suara	%
1	Batu Ampar	19.677	18.787	890	3.38
2	Kuala Mandor B	17.790	17.474	316	2.26
3	Kubu	23.440	22.366	857	2.75
4	Rasau Jaya	16.204	15.347	1.104	5.60
5	Sungai Ambawang	50.036	32.533	17.503	29.88
6	Sungai Kakap	68.352	66.066	2.286	2.75
7	Sungai Raya	126.238	188.126	61.888	38.87
8	Teluk Pakedai	11.288	11.167	121	0.83
9	Terentang	6.737	6.230	507	5.66
	Jumlah	339.762	378.096	89.732	91,98

Sumber: KPU, 2019. Data diolah kembali oleh peneliti.

Kedelapan kecamatan tersebut meliputi Batu Ampar, Kuala Mandor B, Kubu, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Teluk Pakedai, dan Terentang. Kecamatan Sungai Ambawang merupakan kecamatan tertinggi tingkat kekalahannya dengan perolehan suara Pilpres sebesar 50.036 suara dan Pileg

32.533 suara. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar 17.503 suara atau 29,88%. Sementara itu, satu-satunya kecamatan di mana Pileg lebih tinggi secara signifikan hanya di Kecamatan Sungai Raya, masing-masing suara Pilpres sebesar 126.238 dan Pileg 188.126 suara.

Rendahnya elektabilitas Pileg daripada Pilpres dapat disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Namun dalam tulisan ini, mengacu pada beberapa fenomena di atas, terindikasi atau diduga disebabkan oleh ketidakpercayaan (*distrust*), praktek politik uang pembelian suara (*vote buying*), dan rendahnya daya serap pemilih terhadap informasi sang calon. Dengan demikian menarik ditelusuri secara mendalam faktor-faktor apa yang menyebabkan elektabilitas Pileg DPRD Kabupaten Kubu Raya lebih rendah daripada Pilpres.

PENDEKATAN PERILAKU MEMILIH (*VOTING BEHAVIOUR*)

Pendekatan perilaku memilih (*voting behavior*) dalam studi ilmu politik sudah dimulai sejak akhir Perang Dunia II, terutama di Amerika Serikat bersamaan dengan semakin menguatnya aliran positivisme. Aliran positivisme adalah sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan tentang gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam. Paham ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, Emile Durkheim.

Di Amerika Serikat aliran positivisme berkembang berkat jasa Charles E. Merriam, seorang professor ilmu politik di Universitas Chicago. Lewat pemikiran dan usahanya ia mendirikan *The Chicago School* atau madzhab Chicago, yang mana kemudian dikenal sebagai pendekatan baru dalam ilmu politik. Pendekatan ini melahirkan revolusi perilaku (*behavioral revolution*) atau *Behavioralism* yang kemudian melahirkan sejumlah teori, baik yang berisifat *grand* maupun tingkat menengah (*middle level theory*). Sejumlah teori yang dihasilkan, seperti misalnya *system analysis interest aggregation, interest articulation, political socialization, political culture, conversion, rule making, rule application, rule adjudication*, dan lain sebagainya (Gaffar, 2004:97-99).

Beranjak dari sumbangsih pemikiran kaum positivisme, tokoh yang dianggap paling berjasa dalam revolusi behavioralis adalah David Easton. Easton dalam Varma (2007:72-83) meletakkan beberapa asumsi dan tujuan dari behaviorisme, meliputi: regularitas, verifikasi, teknik, kuantifikasi, nilai-nilai, sistematisasi, ilmu murni, dan integrasi. Asumsi dan tujuan dasar ini pada dasarnya mengarah pada upaya pembentukan teori dalam ilmu politik perilaku. Beranjak dari pemikiran Easton, tokoh-tokoh lainnya seperti Gabriel Almond, Norman H. Nie, Sidney Verba, Samuel Huntington dan lainnya ikut dalam upaya mengembangkan ilmu politik perilaku sepanjang tahun 1950-1970.

Secara lebih baik Varma (2007:88-90) memaparkan perkembangan ilmu politik perilaku melalui melalui tiga tahap. *Pertama*, masa sebelum Perang Dunia II. Pada masa ini para ilmuan politik terinspirasi studi-studi yang dilakukan oleh Staur Rice dan Harold Gosnell yang menekankan pentingnya penggunaan metode empiris dan kuantitatif. Pada masa awal ini, para ilmuan politik mulai menggunakan data kuantitatif serta tabel-tabel statistik dalam berbagai tulisan mereka. Meskipun perkembangan secara tradisional masih terus berlangsung.

Kedua, setelah Perang Dunia II. Penggunaan metode empiris dan kuantitatif berkembang cukup pesat. Sejumlah penulis seperti: David Easton, Gabriel Almond, Robert Dahl, Karl Deutsch, Harold Lasswell mengembangkan pola teoritis dan rancangan penelitian yang mengarah pada upaya membangun teori empiris atau kausal. Berbagai pendekatan dan teori bermunculan seperti misalnya pendekatan sistemik, teori pembuatan keputusan, pemusatan perhatian pada komunikasi serta pembaharuan teoritis lainnya muncul pada awal tahun 1950-an. Jadi, upaya teoritis ini membawa perubahan besar ke dalam semua sub-sub bidang ilmu politik. Namun, upaya-upaya teoritis yang dilakukan oleh para ahli pada masa periode ini tidak lepas dari kritik kaum tradisionalis dan pasca behavioralis bahwa upaya tersebut terlalu teoritis dan luas sehingga kemajuan teknik pengujian teori tetap menghadapi kesulitan menjangkau seluruh bangunan teori.

Ketiga, perkembangan tahun 1960an yang membuahkan teknik matematis, analisa multi-variasi dan strategi kuantitatif yang meluas, sehingga perlengkapan

teoritisnya telah jauh ditinggalkan. Kaum behavioralis terbagi ke dalam dua aliran pemikiran, yakni behavioralis teoritis dan behavioralis positif. Behavioralis teoritis membuat jaringan teori tanpa dikendalikan oleh penemuan-penemuan substantif, sedangkan behavioralis positif tenggelam ke dalam metode-metode sehingga mengabaikan teori dan ilmu politik itu sendiri.

Revolusi behavioral menghasilkan beberapa pendekatan dalam studi ini, yaitu: (1) pendekatan sosiologi yang dikembangkan oleh ilmuan dari *University of Colombian*; (2) pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh mashab Machigan dari *University of Machigan* di Ann Arbor; dan (3) pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) dan Studi-studi lanjutan pada rentang era 1990-an menghasilkan beberapa teori yang lebih aplikatif dengan media dan teknologi seluler. Di antaranya, teori media dan pemebentukan opini. Namun, dalam kajian ini menggunakan pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) dan teori media dan pembentukan opini dari diantaranya Zaller.

PENDEKATAN PILIHAN RASIONAL (RATIONAL-CHOICE)

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim juga disebut dengan pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an. Menurut pendekatan ini, yang menentukan dalam sebuah Pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga negara yang cakap. Salah satu tokoh penting yang menggagas pendekatan ini adalah V.O. Key. Dalam bukunya yang cukup terkenal, *The Responsible Electorate*, ia mengatakan bahwa pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan sosiologis yang dicirikan dengan kuatnya ikatan sosial struktural dan pendekatan psikologis yang dicirikan dengan kuatnya ikatan partai, telah merendahkan rasionalitas manusia.

Lebih lanjut Key mengatakan bahwa yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauhmana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya. Penilaian seperti ini oleh Key disebut dengan pilihan secara *restrospektif*. Apabila penilaian pemilih positif

terhadap kinerja pemerintah, partai, atau wakil yang sedang berkuasa, maka mereka akan dipilih kembali, tetapi jika negatif tentu tidak dipilih kembali (Roth, 2009: 48). Dengan demikian, keputusan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada si A atau si B tergantung dari sejauhmana prestasi kerja yang telah dicapai oleh sang calon.

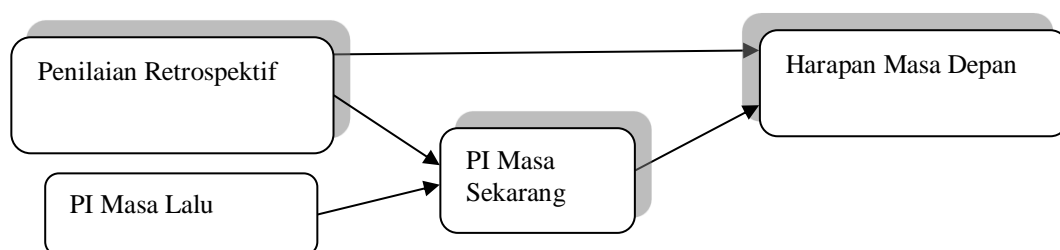
Salah satu teori klasik pendekatan *rational-choice* dikemukakan oleh Anthony Downs. Downs dalam Roth (2009:49) menjelaskan mengenai *homo economicus*, mengatakan bahwa pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau kalaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain (*self-interest axiom*). Walaupun menurut Downs tidak semua orang memiliki sifat egois, bahkan dalam politik sekalipun. Manusia bertindak egois karena keinginan mengoptimalkan kesejahteraan material mereka. Jika, ini diterapkan pada perilaku pemilih, maka pemilih yang rasional akan memilih calon yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Jadi, pemilih tidak terusik oleh konsep politis sang calon. Downs menamakan perilaku ini dengan '*utility maximation*' dan untuk mencapai kebutuhan maksimal tersebut, pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan calon pada masa lalu, dan apa yang mungkin dilakukan pada masa mendatang. Jadi, pemilih harus memiliki informasi yang lengkap.

Pemikiran Key dan Downs kemudian dikembangkan oleh Morris P. Fiorina dalam Roth (2008:51-52). Fiorina mengembangkan kedua pemikiran terdahulu dengan mengajukan model Keputusan Pemilu Restrospektif. Model Keputusan Pemilu Restruspektif menghubungkan dan kemudian mengkombinasikan pendekatan perilaku Pemilu rasional (*rational choice*) dan pendekatan sosial psikologis dalam menjelaskan perilaku pemilih (Pemilu).

Dasar pemikiran Fiorina tidak saja mempertimbangan pemilihan restrospektif dan prospektif, namun juga konstruksi identifikasi partai yang merupakan jantung model Ann-Arbor yang dirancang sebagai elemen yang sangat tergantung kepada pengaruh restrospektif yang banyak mengalami perubahan melalui pengalaman politis baru. Oleh karena itu Fiorina tidak hanya membedakan

antara masa lalu dan masa depan dalam komponen *rational choice*, melainkan membagi *partay identification* (PI) ke dalam PI masa lalu dan PI masa sekarang.

Gambar: Model Fiorina Mengenai Keputusan Pemilu Retrospektif



Sumber: Fiorina, 1981, dalam Roth, 2008:52.

Keraguan terhadap model Downs adalah bahwa sikap pasar dapat diterjemahkan begitu saja ke dalam sikap politis. Hal ini dikemukakan oleh Geoffrey Brennan dan Loren Lomasky dalam Roth (2008:52) dalam teori mereka mengenai perilaku Pemilu ekspresif. Suara masing-masing pemilih hanya benar-benar menentukan dalam kasus-kasus tertentu, dan biasanya tidak memiliki relevansi bagi hasilnya dan tidak memiliki kegunaan langsung bagi individu itu sendiri. Justru karena itu tingginya tingkat partisipasi dalam Pemilu sulit dihubungkan dengan model Downs mengenai pemilih yang rasional. Menurut Brennan dan Lomasky keputusan untuk memilih dapat dipahami sebagai pernyataan minat atau keinginan mendalam untuk ikut dalam tindakan pemilih itu sendiri (intrinsik). Keputusan individu untuk memilih didasari oleh motivasi yang ekspresif dan bukan instrumental.

TEORI MEDIA DAN PEMBENTUKAN OPINI

Teori ini beranjak dari asumsi bahwa media berperan penting dalam pembentukan opini yang memengaruhi penentuan pilihan orang (Lyengar &

Kinder, 1987; Zaller). Zaller (1992) mengatakan bahwa ketika orang ditanya tentang opini mereka, mereka cenderung memberikan jawaban yang bukan sebenarnya, tetapi cenderung menjawab dengan jawaban yang disesuaikan dengan sikap yang paling menonjol saat penelitian dilaksanakan.

Zaller memulai asumsinya dengan pernyataan bahwa orang yang memiliki kesadaran politik yang tinggi memiliki kecenderungan lebih sering mengakses media. Oleh karena itu, mereka lebih besar kemungkinannya menerima pesan-pesan yang bertentangan, namun besar kemungkinannya menolak ide-ide yang tidak sesuai dengan sistem nilai dasar yang dianutnya. Sebaliknya, orang yang memiliki kesadaran politik yang rendah, menerima sedikit informasi dari diskursus elit melalui media tetapi lebih kecil kemungkinannya menolak keyakinan dan opini yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Lebih lanjut Zaller (1992) mengatakan bahwa opini individu didasarkan pada pertimbangan yang paling mudah diakses oleh individu kapan saja. Ketika seseorang mengemukakan pendapatnya dia tidak mengemukakan pendapat yang mendalam, tetapi menggunakan pertimbangan yang diingatnya dari diskursus elit di media massa dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini. Oleh karena itu, jawaban yang dikemukakan oleh individu kemungkinan besar berbeda jika itu ditanyakan dilain waktu. Dengan demikian, pendapat individu bersifat tidak stabil terutama pada masa memilih (*voting*).

Teori media dan pembentukan opini dari Zaller diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Iyengar dan Kinder (1987) menemukan bukti yang mendukung peran media massa melalui media *priming*, media *framing*, dan *agenda setting*. Neuman (1986) berpendapat bahwa afek media didasarkan pada kecanggihan audiensi, namun memiliki efek yang kecil pada pembentukan opini dan penentuan pilihan. Teori Neuman didasarkan pada ide bahwa media massa lebih berorientasi pada hiburan ketimbang pada komunikasi politik. Orang hanya bisa mengingat 5% dari komunikasi politik yang dia serap. Namun, Neuman sepakat dengan Zaller bahwa orang yang sadar politik menerima lebih banyak informasi dari media ketimbang orang yang kurang sadar politik. Neuman percaya bahwa pernyataan di

atas sangat membatasi efek media, sementara Zaller justru sebaliknya bahwa media berpengaruh besar meski terdapat perbedaan dalam pemahaman politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif. Jenis penelitian ini masuk dalam metode penelitian kualitatif. Dengan demikian penelitian “deskriptif-kualitatif” adalah penelitian yang ingin mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan untuk selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis yang benar. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Untuk mendapatkan informasi akurat dan valid, informan terpilih diwawancarai secara mendalam (deep interview), terutama informan dari masyarakat pemilih (informan kunci) yang berjumlah 17 orang yang dipilih baik secara snowball maupun incidental. Mereka terdiri dari 11 laki-laki dan 6 (enam) perempuan yang merupakan representasi dari yang diambil di 4 (empat) desa terpilih, yaitu Desa Ampera Raya 5 orang, Desa Mega Timur 5 orang, Desa Durian 3 orang, dan Desa Jawa Tengah 4 orang. Sedangkan, informan pangkal dari pihak KPUD Kubu Raya, Panwaslu Kubu Raya dan tokoh masyarakat merupakan sumber informasi dan dokumentasi penting.

FAKTOR MINIMNYA INFORMASI TENTANG CALON YANG DISERAP PEMILIH

Tulisan ini menemukan dominannya jawaban para informan di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat tentang minimnya informasi yang mereka terima tentang calon anggota DPRD yang bertarung dalam Pemilu Legislatif 2019. Meskipun terkesan kontradiktif dengan ketersediaan teknologi dan media informasi seperti televisi dan *Handphone* jawaban mereka ini menarik untuk dikaji lebih jauh.

Salah satu informan yang berasal dari Desa Ampera Raya pemilik warung sate, mengemukakan pandangannya tentang banyaknya jumlah calon DPRD Kubu Raya yang bertarung dalam Pemilu Legislatif 2019 yang membuat ia tidak mencoblos surat suara DPRD Kubu Raya, ia mengatakan bahwa banyaknya calon yang maju membingungkan dirinya untuk memilih siapa, apalagi surat suara tidak mencantumkan gambar sang calon dan hanya nama calon saja. Semakin membuat dirinya bingung. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa para calon tidak ada yang mendatangi dirinya untuk minta dukungan. Terkait dengan adanya poster para calon ia lebih lanjut mengatakan bahwa poster dan baliho memang ada di pinggir-pinggir jalan besar, tetapi banyak yang ukuran kecil, sehingga kalau kita naik motor poster poster itu kurang kita perhatikan.

Senada dengan informan di atas, seorang informan perempuan Ibu Rumah mengatakan bahwa dirinya hanya mencoblos kertas suara presiden karena mudah hanya pilih satu atau dua, sedangkan yang lainnya tidak karena ia bingung siapa yang akan ia pilih dari deretan nama yang jumlahnya ratusan. lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada iklan calon di televisi lokal Kalimantan Barat tetapi tidak tertarik.

Berdasarkan pada wawancara dari pihak KPU Kubu Raya mengatakan bahwa untuk poster, pamflet, benner dan bahkan baliho cukup banyak yang terpasang di sepanjang jalan besar. Bahkan di warung-warung dan toko di Kecamatan Sungai Ambawang banyak waktu itu dijumpai stiker calon.

Pernyataan para informan di atas menunjukkan bahwa: Pertama, informasi yang mereka peroleh sangat minim tentang calon anggota DPRD Kubu Raya. Meskipun mereka terdapat baliho, benner, poster dan iklan calon di televisi lokal tetapi tidak mencuri perhatian mereka. Kedua, pemberitaan dan iklan tentang Pemilihan Presiden tentang kandidat 01 dan 02 menurut mereka terlalu masif, nyaris setiap hari ketika membuka televisi, *Facebooks*, dan ketika di jalanan selalu terlihat baliho kandidat 01 dan 02 telah mencuri perhatian mereka. Ketiga, ketersediaan media informasi hanya sebatas pada jalan kawasan dan jalur tertentu saja, tidak sampai ke pemukiman dalam. Sebagaimana yang dikatakan di atas

bahwa media pengenalan diri calon berada di sepanjang jalan besar, yaitu di Jalan Trans Kalimantan, tetapi tidak sampai ke pemukiman penduduk. Hal ini memungkinkan informasi tentang calon DPRD Kubu Raya kurang mendapat perhatian dari para informan. seperti yang dikatakan salah satu informan di atas bahwa ukuran poster calon yang kecil menyebabkan ia tidak bisa mengenal dengan baik para calon.

Dengan demikian ada dua hal yang menarik. Pertama, media pengenalan diri calon DPRD Kubu Raya melalui poster, pamflet, benner, dan baliho kurang strategis dan efektif dalam dimensi Pemilu serentak yang jumlah calon petarung sangat banyak. Hal ini seperti ketika seseorang dihadapkan pada lembaran kertas berisi gambar tiga dimensi. jika tidak benar-benar fokus, maka orring tersebut tidak akan bisa menangkap objek apa yang terdapat dalam gambar tersebut. Kedua, strategi penguasaan media dengan ‘memborbardir’ berita tentang calon presiden berhasil menggiring opini dan pilihan masyarakat untuk memilih salah satu calon presiden.

Tetapi untuk beberapa informan mereka mengaku mencoblos surat suara presiden, DPD dan DPR RI saja karena alasannya untuk kedua surat suara tersebut jumlah calonnya sedikit dan ada gambar wajah calonnya yang jelas. Menariknya hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi mereka terhadap pemilihan presiden, DPD RI dan DPR RI cukup tinggi, sehingga mereka merasa perlu menyalurkan hak pilihnya kepada calon yang tertera dalam kartu suara. Sementara itu, informan yang menyatakan bahwa ia memilih DPR RI bukan karena ia kenal orangnya/calonnya, tetapi ia mencoblos gambar partainya. Hal ini menunjukkan bahwa ada ikatan sosiologis antara informan ini dengan partai yang dicoblosnya. Di Kabupaten Kubu Raya, PDIP adalah partai penguasa yang selalu menang dalam perhelatan Pemilu dan Pilkada. Bahkan dalam Pemilu serentak 2019 PDIP unggul dengan mampu meraih 8 (delapan) kursi DPRD Kubu Raya. Di Kalimantan Barat umumnya PDIP merupakan representasi politik bagi masyarakat suku Dayak. Tidak jarang kita dengar ada plesetan mengatakan bahwa PDIP adalah Partai Dayak Indonesia Perjuangan. Di tingkat pemilih pedalaman, baik pedalaman dekat maupun

pedalaman jauh, seringkali terdengar pernyataan eksistensialis berikut: “partai kita”. Meskipun berdasarkan pengalaman peneliti tidak semua orang Dayak memilih PDIP.

FAKTOR RASA KECEWA TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD

Tulisan ini juga menemukan adanya faktor kekecewaan mempengaruhi pilihan masyarakat pemilih dalam Pemilu 2019 di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Dengan demikian rasa kecewa ini menimbulkan rasa tidak percaya (*distrust*) dengan calon-calon yang bertarung di Pemilu 2019. Mereka yang mengatakan bahwa mereka kecewa terhadap kinerja anggota dewan adalah mereka yang pernah memilih sebelumnya, pengecualian untuk informan pemula yang kami wawancarai. Mereka membandingkan dengan kinerja anggota periode sebelumnya yang pernah mereka dukung, namun kurang memberikan manfaat banyak bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang warga masyarakat Desa Jawa Tengahberprofesi sebagai sopir truk angkut tanah, ketika ditanyakan mengapa ia tidak memilih calon anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, ia mengatakan bahwa sangat kecewa dengan kinerja anggota dewan sebelumnya yang tidak amanah dengan janji-janji ketika kampanye. Rasa kecewa ini sudah sering ia alami karena dirinya pemilih tua yang sejak jaman orde baru sudah ikut memilih. Hal senanda sampaikan oleh informan lainnya bahwa perasaan kecewanya terhadap kinerja anggota DPRD Kubu Raya yang sebelumnya, selain karena sering ingkar janji juga perilakunya kurang menyenangkan.

Pernyataan para informan di atas menunjukkan bahwa mereka tidak memilih karena pernah kecewa dengan janji-janji anggota DPRD Kubu Raya sebelumnya. Pengalaman memilih yang sudah berkali-kali mereka lakukan baik dalam pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah (Pilkada) memupuk kekecewaan mereka pada calon baru yang bertarung. Meskipun berpendapat menyamaratakan semua anggota atau semua calon tidak amanah tidak juga bijaksana, tetapi itu jawaban mereka. Pengalaman pribadi mereka secara akademik harus dihargai bahwa dalam

dinamika politik elektoral kita ada masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa dikecewakan.

Mereka yang kecewa tidak milih dalam studi politik perilaku, khususnya perilaku memilih, masuk dalam kategori pemilih rasional (*rational choice*). Namun, rasional di sini adalah rasional dalam perspektif politik bukan ekonomi, yang mana kedua hal ini berbeda. Rasional secara ekonomi terkait dengan memilih karena mendapatkan keuntungan tertentu (keuntungan maksimal) baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini para informan tidak menerima keuntungan materi jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi mereka menyerap pengalaman dan informasi dari berbagai sumber.

Para informan yang diwawancarai daya serap mereka terhadap informasi dari berbagai media cukup baik. Jelas bahwa media televisi lokal (dan, nasional) serta internet merupakan media informasi yang paling tidak terbiasa mereka akses. Meskipun porsi program berita lebih sedikit daripada program hiburan. Hal ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya rasa kecewa mereka lebih banyak terbentuk dari pengalaman pribadi dalam memilih. Mereka pernah berhubungan langsung dengan calon atau paling tidak tim sukses dari calon saat Pemilu/Pilkada yang banyak menebar janji dalam hal penilaian kinerja anggota DPRD, para informan dilihat dari pendekatan perilaku memilih (*voting behavior*) masuk dalam perilaku pilihan rasional (*rational choice*). Perilaku rasional di sini adalah perilaku rasional dalam perspektif politik karena mereka telah melakukan penilaian berdasarkan informasi dari media yang mereka lihat atau tonton, meskipun akses mereka terhadap jenis media terbatas.

Kategori pemilih rasional adalah pemilih yang kritis. Mereka cukup responsif dengan keadaan di sekitarnya. Mereka juga aktif dalam hal mencari informasi yang dibutuhkan. Lazimnya pemilih seperti ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Untuk informan di atas memang pendidikan mereka cukup baik rata-rata tamatan SLTA. Sikap politik mereka juga terbentuk dari pengalaman mereka dalam pemilihan.

FAKTOR PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) DENGAN HARGA TINGGI

Tulisan ini menemukan adanya praktek pembelian suara (*vote buying*) dalam pemilihan presiden Pemilu serentak 2019. Dalam Pemilu era reformasi di Indonesia praktek semacam ini bukan sesuatu yang baru dan aneh. Nyaris dalam setiap perhelatan Pemilu dan Pilkada praktek ini selalu ada. Tidak heran jika banyak pengamat yang mengatakan pemilu kita sebagai Pemilu yang brutal, kanibal, kapitalis, dan korup karena politik uang dilakukan secara masif dan terang-terangan.

Dalam hal ini para informan mengatakan bahwa mereka lebih tergiur dengan tawaran politik uang oleh tim sukses pemilihan presiden yang nilainya besar. Sebenarnya yang mereka maksudkan sebagai tim sukses adalah perantara (broker). Peneliti mengetahui ini setelah melakukan *crosscheck* di lapangan. Para broker ini direkrut oleh tim sukses untuk membagikan uang secara langsung kepada pemilih di bawah pengawasan koordinator lapangan.

Mereka yang diwawancarai mengatakan secara variatif bahwa ada yang menerima uang ketika akan berangkat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada juga menerima uang pada malam sebelum pencoblosan, dan bahkan ada yang menerima uang ketika sudah sampai di TPS. Jumlah uang yang mereka terima nilainya bervariasi dengan harga terendah Rp. 200.000 dan harga tertinggi Rp. 400.000. Harga ini bagi mereka melebihi penghasilan mereka sebagai buruh harian, dan atau petani. Bahkan jika dibandingkan dengan praktek pembelian suara pada Pemilu-pemilu sebelumnya harga ini jauh lebih tinggi.

Mengenai adanya bagi-bagi uang menjelang hari pemungutan suara sudah mereka dengar beberapa hari sebelumnya dari salah satu tim sukses yang merupakan pemuda setempat. Para informan mengaku bahwa praktik politik uang terjadi setiap kali pemilu dan mereka akan memilih siapa calon yang memberi nilai lebih besar. Bagi mereka keputusan ini cukup adil, ada uang ada suara. Mereka tidak ingin dibohongi seperti pengalaman masa lalu di mana setelah memberikan suara calon jadi tidak pernah memberikan apa-apa buat mereka.

Pemilu serentak 2019 mereka mengatakan bahwa mereka bukannya tidak mau memilih calon anggota DPRD Kubu Raya tetapi tidak ada pendekatan kepada mereka selaku pemilih. Pendekatan yang mereka maksudkan adalah praktek pembelian suara. Bahwa ada calon yang datang ke desa mereka yang katanya ada memberikan bantuan untuk masjid dan bagi-bagi sarung dan baju koko, tetapi mereka yang diwawancarai tidak mengaku diberi.

Pernyataan informan di atas tentang adanya kunjungan tim sukses ke desa membagikan pakaian dan sarung namun dirinya tidak mendapatkannya menunjukkan bahwa peluang untuk menggunakan hak pilih pada calon anggota DPRD cukup besar apabila ia mendapatkan pembagian pakaian dan sarung. Peneliti melihat masalah ini adalah masalah yang ada di tim sukses. Para tim sukses gagal dalam mendata keseluruhan pemilih di desa dan cenderung hanya mempercayakan sepenuhnya pada para perantara (broker). Karakteristik pemilih seperti bersifat pragmatis jika ia diberi maka ia kemungkinan besar memberikan suaranya kepada calon yang dititipkan kepadanya. Namun, dalam kasus lain tidak ada jaminan mereka yang telah menerima pemberian otomatis memberikan suaranya di hari pemilihan.

Penelitian ini juga mewawancarai salah satu perantara (broker) yang berasal dari desa setempat. Kami meminta pendapatnya tentang politik uang yang isunya marak. Berdasarkan hasil wawancara ia mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar mereka tidak akan memilih jika tidak mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun barang. Jika ada calon yang datang hanya 'menjual air liur' saja tidak dihiraukan. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan perilaku para anggota dewan yang jika sudah terpilih sering lupa janji. Prinsipnya menurut dia, ada suara ada uang atau barang lainnya. Pernyataan perantara tersebut menunjukkan bahwa praktek politik uang dalam Pemilu sudah menjadi rahasia umum. Calon yang maju jika ingin terpilih harus memiliki uang yang cukup untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Kondisi ini memang memprihatinkan bagi penataan demokrasi yang sehat, namun inilah yang terjadi dalam Pemilu kita hari ini dan mungkin akan datang.

Praktek pembelian suara juga ditemui dalam bentuk paket yang masyarakat sebut sebagai “paket suara”. Menariknya dalam sistem ini calon dan tim suksesnya memberikan uang dalam jumlah tertentu yang dalam penelitian mereka menyebutkan angka 500 ribu sampai dengan 1 juta untuk satu paket. Satu paket relatif jumlah suaranya ada yang 500 ribu untuk lima orang dan 1 juta untuk lima orang, tergantung situasi. Jadi ada semacam proses tawar menawar terjadi ketika transaksi suara di lapangan antara calon dan tim sukses dengan pemilih. Hal ini menunjukkan posisi tawar pemilih dan atau masyarakat pemilih cukup tinggi dalam Pemilu Serentak tahun 2019 lalu.

Pemilih pemula merupakan segmentasi pemilih yang menggiurkan bagi para kontestan politik. Salah satu karakteristik pemilih pemula adalah mereka sangat pragmatis, mudah terombang ambing oleh isu atau kondisi politik tertentu. Dalam hal pilihan politik mereka dengan mudah berpindah dari satu pilihan politik ke pilihan politik lainnya dalam waktu yang singkat. Tidak heran apabila dalam kontestasi Pemilu serentak 2019, para kontestan memusatkan perhatian serius pada upayanya untuk menggarap suara pemilih pemula yang juga dapat disebut pemilih milenial (meskipun tidak semua milenial adalah pemula tetapi pemula sudah pasti milenial).

Terkait dengan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, peneliti mengkonfirmasi dengan ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya tentang apakah dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 Panwaslu mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya politik uang dan bagaimana cara Panwaslu menindaklanjuti laporan tersebut. Pihak Panwaslu mengatakan bahwa ada beberapa laporan yang masuk baik yang bersifat pidana maupun administratif. Jumlahnya ada 14 laporan yang mana 8 diantaranya adalah kasus pidana dan hanya 6 kasus administratif. Untuk kasus pidana 5 tidak bisa ditindak lanjut karena kurang dukungan bukti-bukti, sedangkan 3 kasus ditindaklanjuti ke proses penyidikan. Di mana salah satu diantaranya terkait dengan politik uang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa terkait dengan mekanisme yang mereka lakukan dalam menyerap laporan pelanggaran seperti praktek politik uang salah satunya dengan cara dapat langsung datang ke kantor Bawaslu dan atau melaporkan melalui aplikasi yang ada paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh pelapor. Pelaporan mesti disertai dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 7. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa problemnya mengapa seringkali tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu adalah karena laporan serig tidak disertai dengan bukti (alat bukti) yang kuat.

KESIMPULAN

Tulisan ini menemukan 3 (tiga) faktor penyebab rendahnya elektabilitas pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Kubu Raya. Ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Faktor minimnya informasi calon anggota DPRD yang diterima masyarakat; (2) Faktor rasa kecewa terhadap kinerja anggota DPRD; dan (3) Faktor pembelian suara (*vote buying*) dengan harga tinggi.

Dari ketiga faktor tersebut di atas, faktor minimnya informasi calon anggota DPRD yang diterima masyarakat merupakan faktor dominan sebagai jawaban para informan yang diwawancarai. Faktor ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal penting. Pertama, terkait dengan maraknya *framing* isu pemilihan presiden oleh media *mainstream* yang menenggelamkan berita pemilihan legislatif, khususnya DPRD Kabupaten Kubu Raya. Kedua, ukuran alat peraga kampanye calon yang terpasang di pinggir jalan tidak cukup besar untuk bisa ditangkap atau dilihat oleh masyarakat pemilih terutama ketika mereka sedang berada di atas kendaraan. Ketiga, jumlah alat kampanye calon yang jumlahnya cukup banyak namun terpampang secara serampangan dan kurang menarik perhatian. Keempat, format kertas suara yang hanya menampilkan nama calon yang jumlahnya banyak (509 orang) dan tidak menampilkan gambar/foto calon membuat para informan bingung dan memutuskan untuk tidak memilih.

Faktor rasa kecewa terhadap kinerja anggota DPRD. Faktor ini terkait dengan pengalaman memilih anggota DPRD yang sudah berkali-kali mereka lakukan dan berkali pula dibohongi. Penilaian seperti ini terkait dengan pilihan secara restrospektif. Dalam hal ini mereka menilai secara negatif pada calon anggota DPRD Kubu Raya. Pemilih seperti ini masuk dalam pendekatan *rational choice* dari sudut pandang politik.

Faktor pembelian suara (*vote buying*) dengan harga tinggi. Faktor ini terkait dengan harga satu suara ditawarkan dengan harga yang tinggi mencapai 400 ribu persuara. Perilaku politik seperti ini terkait dengan kalkulasi untung rugi yang mana harapannya mendapatkan keuntungan tertinggi (*utility maximation*).

Untuk mewujudkan Pemilu berkualitas di masa depan, baik secara prosedural maupun substansi, semua pihak berkepentingan mengevaluasi dan membuat terobosan baru dalam sistem pemilihan kita. Pihak KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk membuat aturan terkait dengan ukuran alat peraga kampanye yang standar dapat dengan mudah dilihat baik oleh pengendara dan pejalan kaki. Pihak anggota DPRD Kubu Raya terpilih untuk menjalankan amanah masyarakat pemilih dengan meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pihak Bawaslu untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan pada pelaksanaan Pemilu. sebagai Lembaga pengawas Bawaslu memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggaraan pengawasan seperti integritas, kemandirian (independensi), dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Leo, 2007. *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Meriam, 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BPS Kabupaten Kubu Raya, 2018. *Kecamatan Sungai Ambawang Dalam Angka Tahun 2018*. BPS Kabupaten Kubu Raya.

- BPS Kabupaten Kubu Raya, 2018. *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2018*. BPS Kabupaten Kubu Raya.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaus, Gerald F., dan Chandran Kukathas. (2012). *Handbook Teori Politik*. Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Nusa Media bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP) Jakarta.
- Giddes, Barbara, 1996. *Politician's Dilema: Building State Capacity in Latin America*. California: University California Press.
- Harrison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Heryanto, Gun Gun, 2017, Ironi demokrasi Pasangan Calon Tunggal, Media Indonesia.com, 09/03/2017. Diambil tanggal 29/03/2017.
- Ishiyama, John T., dan Marijke Breuning. (2013). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21*. Cetakan Ke-1. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iyenger, S., & Kinder, D. R. (1987), *New That Matters: Television and American Opinion*. Chicago: Univerity ChicagoPress.
- Katz, Richard S., dan Crptty, William, 2014. *Handbook Partai Politik*. Terjemahan (Penterjemah: Ahmad Asnawi). Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Nusa Media bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP) Jakarta.
- Kompas.com., Jum'at, 13 Juni 2014. "Pemilih Pilpres 2014 Bertambah 2,4 Juta". Diunduh pada 13 Juni 2019.
- KPU Kabupaten Kubu Raya, 2019. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019". <https://kpu.kuburayakab.go.id>.

- KPU Kabupaten Kubu Raya, 2019. “Berita Acara Nomor 125/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019”.
<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/rekapitulasi/>.
- KPU Kabupaten Kubu Raya, 2019. “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya No. 103/PL.01.9-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan.
- Mannheim, J.B. and Rich, R.C. (1995). *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science*, 4th ed., New York: Longman.
- Mas’oed, Mohtar & Colin MacAndrews (edt.), 1997. *Perbandingan Sistem Politik*. Cetakan ke-14. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Neuman, W. Lawrence, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7, Cetakan ke- II, terjemahan. Jakarta: PT Indeks.
- Pamungkas, Sigit, 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Labolatorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.
- Pasaribu, Rowland B.F., 2013. *Konsep-Konsep Politik*. Bahan Kuliah, rowlandpasaribu.file.wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep politik.pdf, diunduh pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 09.45 WIB).
- Plano, Jack C., 1985. *Kamus Analisa Politik*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali.
- Romli, Lili, 2004. *Demokrasi Dalam Bayang-Bayang Kekuatan Jawara Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004*. Jakarta: LIPI.
- Trichayono, Ibnu, 2009. Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Malang: In Trans Publishing.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Zaller, J. R., 1992. *The Nature and Origins of Mass Opinion*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

